

LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

No. 83, 1997 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3712)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1997  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1995/96

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3625);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/96.

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp82.022.692.262.528 (delapan puluh dua triliun dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri dari:

a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp73.013.891.813.047 (tujuh puluh tiga triliun tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh tujuh rupiah);

b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp9.008.800.449 481 (sembilan triliun delapan miliar delapan ratus juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp73.013.891.813.047 (tujuh puluh tiga triliun tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat puluh tujuh rupiah) terdiri dari:

a. Penerimaan pajak sebesar Rp48.686.292.660.915 (empat puluh delapan triliun enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp16.542.298.354.653 (enam belas triliun

lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

c. Penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp7.785.300.797.479 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Rincian pendapatn negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut pada penjelasan pasal ini.

## Pasal 2

(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp79.215.691.777.857 (tujuh puluh sembilan triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari:

a. Pengeluaran rutin sebesar Rp50.435.006.650.187 (lima puluh triliun empat ratus tiga puluh lima miliar enam juta enam ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dirinci menurut sektor:

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 01 | SEKTOR INDUSTRI   | Rp48.488.465.684     |
| 02 | SEKTOR PERTANIAN<br>DAN KEHUTANAN   | Rp178.886.687.840    |
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN  | Rp23.582.615.694     |
| 04 | SEKTOR TENAGA KERJA   | Rp103.936.213.159    |
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN,<br>PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,<br>KEUANGAN DAN KOPERASI                                    | Rp28.166.471.392.261 |
| 06 | SEKTOR TRANSPORTASI,<br>METEOROLOGI DAN GEOFISIKA   | Rp218.559.836.970    |
| 07 | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN<br>ENERGI   | Rp103.371.377.457    |
| 08 | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN<br>TELEKOMUNIKASI  | Rp20.633.946.232     |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH<br>DAN TRANSMIGRASI   | Rp8.353.111.198.915  |
| 10 | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN<br>TATA RUANG   | Rp150.590.435.459    |
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN<br>NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP<br>TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA<br>DAN OLAH RAGA | Rp3.102.571.309.788  |
| 12 | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN<br>KELUARGA SEJAHTERA   | Rp207.617.313.809    |
| 13 | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,<br>KESEHATAN, PERANAN WANITA,<br>ANAK DAN REMAJA                                   | Rp436.065.271.217    |
| 14 | SEKTOR PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN  | Rp10.713.400.880     |
| 15 | SEKTOR AGAMA  | Rp863.299.786.937    |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN<br>TEKNOLOGI  | Rp260.384.786.258    |
| 17 | SEKTOR HUKUM  | Rp490.141.276.116    |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN<br>PENGAWASAN  | Rp2.303.623.187.716  |
| 19 | SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN<br>LUAR NEGERI, PENERANGAN,<br>KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA                              | Rp923.091.629.995    |
| 20 | SEKTOR PERTAHANAN DAN<br>KEAMANAN   | Rp4.469.866.517.800  |

b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp28.780.685.127.670 (dua puluh delapan triliun tujuh ratus

delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dirinci menurut sektor:

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 01 | SEKTOR INDUSTRI  | Rp805.316.352.978   |
| 02 | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN   | Rp890.981.117.387   |
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN   | Rp1.897.035.611.915 |
| 04 | SEKTOR TENAGA KERJA  | Rp139.254.676.609   |
| 05 | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI                                 | Rp912.411.591.452   |
| 06 | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA   | Rp5.382.628.459.887 |
| 07 | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI   | Rp3.111.497.593.675 |
| 08 | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI  | Rp458.204.623.115   |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI   | Rp6.187.566.222.622 |
| 10 | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG   | Rp439.001.025.354   |
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | Rp3.130.382.267.391 |
| 12 | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA   | Rp265.578.407.620   |
| 13 | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA                                | Rp987.064.029.120   |
| 14 | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  | Rp1.037.637.402.881 |
| 15 | SEKTOR AGAMA   | Rp238.419.554.100   |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  | Rp431.626.300.091   |
| 17 | SEKTOR HUKUM   | Rp117.350.156.864   |
| 18 | SEKTOR APARTUR NEGARA DAN PENGAWASAN   | Rp624.032.324.444   |
| 19 | SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA                           | Rp130.645.827.545   |
| 20 | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN   | Rp1.594.051.582.620 |

(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tersebut pada penjelasan pasal ini.

#### Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 adalah sebesar Rp2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 1997  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 1997  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO

TAMBAHAN  
LEMBARAN NEGARA RI  
No. 3712 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 83)

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1997  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1995/96

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp2.807.000.484.671 (dua triliun delapan ratus tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1994/95 sebesar Rp3.800.681.311.750 (tiga triliun delapan ratus miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1995/96 menjadi sebesar Rp6.607.681.796.421 (enam triliun enam ratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Ayat (1)  
a. Cukup jelas  
b. seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut:

| RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI                              |                    |
|--|--------------------|
| TAHUN ANGGARAN 1995/96                                       |                    |
| (dalam rupiah)   |                    |
| Penerimaan pajak   | 48.686.292.660.915 |
| 0110 Pajak penghasilan (Pph)                                 | 21.012.029.564.398 |
| 0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)                           | 18.519.409.106.064 |
| 0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)                           | 1.893.933.497.911  |
| 0210 Penerimaan bea masuk                                    | 3.029.408.339.443  |
| 0220 Penerimaan cukai  | 3.592.648.372.351  |
| 0230 Penerimaan pajak ekspor/pungutan ekspor                 | 186.068.615.463    |
| 0240 Bea meterai   | 329.128.446.094    |
| 0250 Bea lelang  | 123.666.719.191    |
| Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam              | 16.542.298.354.653 |
| 0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam                     | 16.054.714.886.653 |
| 0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM)                     | 487.583.468.000    |
| Penerimaan bukan pajak                                       | 7.785.300.797.479  |
| 0410 Penerimaan pendidikan                                   | 49.866.785.752     |
| 0411 Uang pendidikan   | 46.772.116.792     |
| 0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan    | 1.768.566.282      |
| 0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek                    | 1.084.477          |
| 0419 Penerimaan pendidikan lainnya                           | 1.325.018.201      |
| 0480 Penerimaan pendidikan swadana                           | 277.340.784.884    |
| 0481 Penerimaan pendidikan swadana                           | 277.340.784.884    |
| 0510 Penjualan hasil produksi, sitaan                        | 24.192.438.860     |
| 0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan                   | 817.707.614        |
| 0512 Penjualan hasil peternakan                              | 973.238.268        |
| 0513 Penjualan hasil perikanan                               | 350.213.812        |
| 0514 Penjualan hasil sitaan                                  | 8.546.650.824      |
| 0515 Penjualan obat-obatan, dan hasil farmasi                | 38.454.476         |
| 0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya   | 277.221.337        |
| 0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan                    | 10.225.524.552     |
| 0519 Penjualan lainnya                                       | 2.963.427.977      |
| 0520 Penjualan aset tetap                                    | 30.857.837.488     |
| 0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah             | 10.872.924.252     |
| 0522 Penjualan kendaraan bermotor                            | 1.526.594.513      |
| 0523 Penjualan sewa beli                                     | 15.919.140.505     |
| 0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan | 2.539.178.218      |
| 0530 Penerimaan sewa   | 13.086.498.044     |
| 0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri                          | 4.620.601.243      |
| 0532 Sewa gedung, bangunan, gudang                           | 2.475.937.267      |
| 0533 Sewa benda-benda bergerak                               | 4.724.170.478      |
| 0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya                   | 1.265.789.056      |
| 0540 Penerimaan jasa I                                       | 480.074.180.175    |
| 0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya   | 7.192.439.351      |

|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| 0542 | Penerimaan tempat hiburan, taman, museum                     | 204.378.702       |
| 0543 | Penerimaan surat keterangan, visa paspor dan SIM, STNK, BPKB | 106.160.243.618   |
| 0544 | Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah                      | 92.466.195.335    |
| 0545 | Pemberian hak dan perijinan                                  | 203.925.517.912   |
| 0546 | Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan        | 7.421.804.186     |
| 0547 | Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa pekerjaan                 | 36.754.155.076    |
| 0548 | Penerimaan jasa kantor urusan agama                          | 4.781.261.210     |
| 0549 | Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan                   | 21.168.184.785    |
| 0550 | Penerimaan jasa II   | 248.340.488.049   |
| 0551 | Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)                 | 39.557.911.096    |
| 0552 | Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda  | 149.530.402.420   |
| 0553 | Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin                   | 2.721.627.881     |
| 0554 | Penerimaan jasa kantor catatan sipil                         | 10.363.416.396    |
| 0555 | Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak dengan surat paksa    | 809.445.645       |
| 0556 | Penerimaan uang pewarganegaraan                              | 1.133.486.950     |
| 0559 | Penerimaan jasa lainnya                                      | 44.224.197.661    |
| 0560 | Penerimaan rutin dari luar negeri                            | 24.411.279.670    |
| 0561 | Bea visa dan paspor  | --                |
| 0562 | Bea konsuler   | --                |
| 0563 | Bea maritim  | --                |
| 0564 | Bea pemeriksaan  | --                |
| 0565 | Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan                | --                |
| 0566 | Bea legalisasi surat-surat perdagangan                       | --                |
| 0569 | Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri                    | 24.411.279.670    |
| 0580 | Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana                  | 287.983.603.762   |
| 0581 | Penerimaan penjualan swadana                                 | 2.554.683.493     |
| 0582 | Penerimaan sewa swadana                                      | 4.610.244.007     |
| 0583 | Penerimaan jasa swadana                                      | tidak jelas       |
| 0614 | Hasil denda, denda tilang dan sebagainya                     | 27.544.009.901    |
| 0615 | Ongkos perkara   | 1.635.358.847     |
| 0619 | Kejaksaan dan peradilan lainnya                              | 4.534.557.774     |
| 0710 | Penerimaan dari investasi                                    | 5.410.147.627.981 |
| 0711 | Bagian laba dari BUMN  | 1.603.937.956.343 |
| 0712 | Penjualan investasi permanen                                 | 1.673.825.990.037 |
| 0713 | Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)              | 2.132.383.681.601 |
| 0810 | Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan           | 46.205.428.869    |
| 0811 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                     | 8.848.930.638     |
| 0812 | Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom             | 13.916.049.990    |

|                                       |   |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| 0813                                  | Penerimaan kembali belanja pensiun  | 14.676.377.768     |
| 0814                                  | Penerimaan kembali belanja rutin lainnya  | 3.382.867.990      |
| 0815                                  | Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya   | 5.381.202.483      |
| 0820                                  | Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu   | 24.019.043.750     |
| 0821                                  | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat  | 7.304.653.903      |
| 0822                                  | Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom  | 1.443.616.662      |
| 0823                                  | Penerimaan kembali belanja pensiun  | 3.866.816.244      |
| 0824                                  | Penerimaan kembali belanja rutin lainnya  | 2.818.089.695      |
| 0825                                  | Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya   | 8.585.867.246      |
| 0880                                  | Penerimaan lain-lain swadana  | 17.540.732.659     |
| 0881                                  | Penerimaan lain-lain swadana  | 17.540.732.659     |
| 0890                                  | Penerimaan lain-lain  | 816.854.035.612    |
| 0891                                  | Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji   | 1.139.927.412      |
| 0892                                  | Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan   | 9.479.027.669      |
| 0893                                  | Penerimaan kembali ganti rugi   | 5.856.034.297      |
| 0894                                  | Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN | 476.177.824.652    |
| 0899                                  | Penerimaan anggaran lainnya   | 324.201.221.582    |
|                                       | JUMLAH  | 73.013.891.813.047 |
| RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN        |   |                    |
| TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah) |   |                    |
| 0910                                  | Bantuan Program   | --                 |
| 0920                                  | Bantuan Proyek  | 9.008.800.449.481  |
|                                       | JUMLAH  | 9.008.800.449.481  |

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (21)

Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN

TAHUN ANGGARAN 1995/96

(dalam rupiah)

|      |  |                 |
|------|--|-----------------|
| 01   | SEKTOR INDUSTRI                        |                 |
| 01.1 | Subsektor Industri                     | 48.488.465.684  |
|      | Jumlah Sektor Industri                 | 48.488.465.684  |
| 02   | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN         |                 |
| 02.1 | Subsektor Pertanian                    | 104.157.459.246 |
| 02.2 | Subsektor Kehutanan                    | 74.729.228.594  |
|      | Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan  | 178.886.687.840 |
| 03   | SEKTOR PENGAIRAN                       |                 |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 13.299.767.572  |
| 03.2 | Subsektor Irigasi                      | 10.282.848.122  |
|      | Jumlah Sektor Pengairan                | 23.582.615.694  |
| 04   | SEKTOR TENAGA KERJA                    |                 |

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja  | 103.936.213.159    |
|      | Jumlah Sektor Tenaga Kerja  | 103.936.213.159    |
| 05   | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI  |                    |
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri  | 47.254.780.807     |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri   | 19.404.238.805     |
| 05.4 | Subsektor Keuangan  | 28.025.972.381.961 |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil  | 73.839.990.688     |
|      | Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi                                 | 28.166.471.392.261 |
| 06   | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA  |                    |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan   | 16.268.301.611     |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat  | 16.184.936.418     |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut   | 114.310.910.888    |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara  | 39.983.690.177     |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)  | 31.811.997.876     |
|      | Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika   | 218.559.836.970    |
| 07   | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI  |                    |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan  | 100.244.780.934    |
| 07.2 | Subsektor Energi  | 3.126.596.523      |
|      | Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi   | 103.371.377.457    |
| 08   | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI   |                    |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata  | 11.059.530.094     |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi  | 9.574.416.138      |
|      | Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi  | 20.633.946.232     |
| 09   | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI  |                    |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah  | 8.301.977.950.386  |
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan   | 51.133.248.529     |
|      | Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi   | 8.353.111.198.915  |
| 10   | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG  |                    |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup  | 4.283.940.124      |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang  | 146.306.495.335    |
|      | Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang   | 150.590.435.459    |
| 11   | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA        |                    |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan  | 2.832.062.672.152  |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan   | 200.924.728.755    |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa                                    | 61.895.645.786     |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga  | 7.688.263.095      |
|      | Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga | 3.102.571.309.788  |
| 12   | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA  |                    |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga   |                    |



|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
|      | Berencana   | 207.617.313.809    |
|      | Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera                                   | 207.617.313.809    |
| 13   | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA              |                    |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial  | 74.964.937.842     |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan   | 361.100.333.375    |
|      | Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja       | 436.065.271.217    |
| 14   | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   |                    |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman  | 8.874.857.300      |
| 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan  | 2.838.543.580      |
|      | Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman  | 10.713.400.880     |
| 15   | SEKTOR AGAMA  |                    |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama  | 133.841.394.346    |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama  | 729.458.392.591    |
|      | Jumlah Sektor Agama   | 863.299.786.937    |
| 16   | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI   |                    |
| 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar  | 176.862.749.858    |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi           | 21.970.929.672     |
| 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan  | 1.082.633.172      |
| 16.6 | Subsektor Informasi dan Statistik   | 60.468.473.556     |
|      | Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  | 260.384.786.258    |
| 17   | SEKTOR HUKUM  |                    |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional  | 420.474.476.000    |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum  | 69.666.800.116     |
|      | Jumlah Sektor Hukum   | 490.141.276.116    |
| 18   | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN   |                    |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara   | 2.135.632.940.726  |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan                           | 167.990.246.990    |
|      | Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan  | 2.303.623.187.716  |
| 19   | SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA        |                    |
| 19.1 | Subsektor Politik   | 54.856.640.563     |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri  | 635.909.565.770    |
| 19.3 | Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa                                    | 232.325.423.662    |
|      | Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | 923.091.629.995    |
| 20   | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  |                    |
| 20.2 | Subsektor ABRI  | 4.233.569.686.800  |
| 20.3 | Subsektor Pendukung   | 236.296.831.000    |
|      | Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan   | 4.469.866.517.800  |
|      | JUMLAH  | 50.435.006.650.187 |
|      | RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1995/96  | (dalam rupiah)     |
| 01   | SEKTOR INDUSTRI   |                    |
| 01.1 | Subsektor Industri  | 619.452.353.248    |

|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
|      | Jumlah Sektor Industri   | 619.452.353.248   |
| 02   | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN   |                   |
| 02.1 | Subsektor Pertanian  | 670.426.510.765   |
| 02.2 | Subsektor Kehutanan  | 6.360.053.938     |
|      | Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan  | 676.786.564.703   |
| 03   | SEKTOR PENGAIRAN   |                   |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air   | 366.683.179.367   |
| 03.2 | Subsektor Irigasi  | 748.727.628.321   |
|      | Jumlah Sektor Pengairan  | 1.115.410.807.688 |
| 04   | SEKTOR TENAGA KERJA  |                   |
| 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja   | 121.602.436.124   |
|      | Jumlah Sektor Tenaga Kerja   | 121.602.436.124   |
| 05   | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI                                 |                   |
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri   | 18.308.731.377    |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri  | 33.898.280.415    |
| 05.3 | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional  | 366.719.194.996   |
| 05.4 | Subsektor Keuangan   | 2.088.154.031     |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil   | 184.286.192.915   |
|      | Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi                          | 605.300.553.734   |
| 06   | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA   |                   |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan  | 3.027.540.754.644 |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat   | 262.933.058.380   |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut  | 198.693.201.179   |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara   | 176.147.306.603   |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)                                     | 13.099.339.950    |
|      | Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika  | 3.678.413.660.756 |
| 07   | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI   |                   |
| 07.1 | Subsektor Pertambangan   | 33.965.391.625    |
| 07.2 | Subsektor Energi   | 791.053.791.466   |
|      | Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi  | 825.019.183.091   |
| 08   | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI  |                   |
| 08.1 | Subsektor Pariwisata   | 37.696.578.484    |
| 08.2 | Subsektor Pos dan Telekomunikasi   | 31.231.580.341    |
|      | Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi   | 68.928.158.825    |
| 09   | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI   |                   |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah   | 4.895.562.418.500 |
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan  | 851.774.748.985   |
|      | Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi  | 5.747.337.167.485 |
| 10   | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG   |                   |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup   | 205.476.063.441   |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang   | 51.003.663.797    |
|      | Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang  | 256.479.727.238   |
| 11   | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA |                   |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan   | 2.245.384.949.022 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah  |                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| dan Kedinasan   | 112.335.628.033   |
| 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa                               | 57.537.385.215    |
| 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga   | 35.686.970.287    |
| Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga | 2.450.944.932.557 |
| 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA   |                   |
| 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana  | 234.293.734.671   |
| Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera   | 234.293.734.671   |
| 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA                                     |                   |
| 13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial   | 73.535.123.450    |
| 13.2 Subsektor Kesehatan  | 742.716.172.977   |
| 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja  | 9.028.500.992     |
| Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja                                 | 825.279.797.419   |
| 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  |                   |
| 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman   | 433.231.038.909   |
| 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan   | 35.917.600.735    |
| Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman  | 469.148.639.644   |
| 15 SEKTOR AGAMA   |                   |
| 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama   | 78.468.075.765    |
| 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama   | 115.649.600.210   |
| Jumlah Sektor Agama   | 194.117.675.975   |
| 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  |                   |
| 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi  | 147.025.694.309   |
| 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar   | 28.877.520.741    |
| 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                | 60.133.063.355    |
| 16.4 Subsektor Kelautan   | 37.592.584.863    |
| 16.5 Subsektor Kedirgantaraan   | 14.864.839.793    |
| 16.6 Subsektor Informasi dan Statistik  | 107.971.390.069   |
| Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan teknologi  | 396.465.093.130   |
| 17 SEKTOR HUKUM   |                   |
| 17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional   | 10.583.094.234    |
| 17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum   | 32.773.803.712    |
| 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum   | 73.854.898.918    |
| Jumlah Sektor Hukum   | 17.211.796.864    |
| 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN  |                   |
| 18.1 Subsektor Aparatur Negara  | 479.551.463.711   |
| 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan  | 48.981.211.540    |
| Jumlah Sektor Apartur Negara dan Pengawasan   | 582.532.675.251   |
| 19. SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA                              |                   |
| 19.1 Subsektor Politik  | 5.127.816.494     |
| 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri   | 3.490.214.122     |
| 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi   |                   |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|   | dan Media Massa   | 73.545.111.965     |
|   | Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | 82.163.142.581     |
| 20  | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  |                    |
| 20.1  | Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat                               | 2.425.000.000      |
| 20.2  | Subsektor ABRI  | 691.995.677.205    |
| 20.3  | Subsektor Pendukung   | 64.575.900.000     |
|   | Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan   | 758.996.577.205    |
|   | JUMLAH  | 19.771.884.678.189 |
| RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1995/96 (dalam rupiah) |   |                    |
| 01  | SEKTOR INDUSTRI   |                    |
| 01.1  | Subsektor Industri  | 185.863.999.730    |
|   | Jumlah Sektor Industri  | 185.863.999.730    |
| 02  | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN  |                    |
| 02.1  | Subsektor Pertanian   | 210.444.914.054    |
| 02.2  | Subsektor Kehutanan   | 3.749.638.630      |
|   | Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan   | 214.194.552.684    |
|   | Jumlah Sektor Pengairan   | Tidak jelas        |
| 04  | SEKTOR TENAGA KERJA   |                    |
| 04.1  | Subsektor Tenaga Kerja  | 17.652.240.485     |
|   | Jumlah Sektor Tenaga Kerja  | 17.652.240.485     |
| 05  | SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI              |                    |
| 05.1  | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri  | --                 |
| 05.2  | Subsektor Perdagangan Luar Negeri   | 4.425.411.989      |
| 05.3  | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional   | 65.488.877.312     |
| 05.4  | Subsektor Keuangan  | 4.530.784.181      |
| 05.5  | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil  | 232.665.964.236    |
|   | Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi       | 307.111.037.718    |
| 06  | SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA                                      |                    |
| 06.1  | Subsektor Prasarana Jalan   | 986.299.113.595    |
| 06.2  | Subsektor Transportasi Darat  | 354.644.692.673    |
| 06.3  | Subsektor Transportasi Laut   | 272.430.119.556    |
| 06.4  | Subsektor Transportasi Udara  | 85.007.816.123     |
| 06.5  | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)                  | 5.833.057.184      |
|   | Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika                               | 1.704.214.799.131  |
| 07  | SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI  |                    |
| 07.1  | Subsektor Pertambangan  | 3.907.909.000      |
| 07.2  | Subsektor Energi  | 2.282.570.501.584  |
|   | Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi   | 2.286.478.410.584  |
| 08  | SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI   |                    |
| 08.1  | Subsektor Pariwisata  | --                 |
| 08.2  | Subsektor Pos dan Telekomunikasi  | 389.276.464.290    |
|   | Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi                                    | 389.276.464.290    |
| 09  | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI  |                    |
| 09.1  | Subsektor Pembangunan Daerah  | 352.024.733.309    |
| 09.2  | Subsektor Transmigrasi dan  |                    |

|      |   |                 |
|------|---|-----------------|
|      | Pemukiman Perambah Hutan  | 88.204.321.828  |
|      | Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi   | 440.229.055.137 |
| 10   | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG  |                 |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup  | 152.530.862.633 |
| 10.2 | Subsektor Tata Ruang  | 29.990.435.483  |
|      | Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang   | 182.521.298.116 |
| 11   | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA        |                 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan  | 611.783.079.900 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan   | 67.591.792.674  |
| 11.3 | Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa                                    | 62.462.260      |
| 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah Raga  | 35.686.970.287  |
|      | Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga | 679.437.334.834 |
| 12   | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA  |                 |
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana   | 31.284.672.949  |
|      | Jumlah Sektor kependudukan dan Keluarga Sejahtera   | 31.284.672.949  |
| 13   | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA  |                 |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial  | 10.677.486.648  |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan   | 151.106.745.053 |
| 13.3 | Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja   | --              |
|      | Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan Remaja                                 | 161.784.231.701 |
| 14   | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   |                 |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman  | 560.117.837.936 |
| 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan  | 8.370.925.301   |
|      | Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman  | 568.488.763.237 |
| 15   | SEKTOR AGAMA  |                 |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama  | 8.884.994.561   |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama  | 35.416.883.564  |
|      | Jumlah Sektor Agama   | 44.301.878.125  |
| 16   | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI   |                 |
| 16.1 | Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi   | 12.273.675.457  |
| 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar  | 14.886.820.033  |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                     | 941.725.966     |
| 16.4 | Subsektor Kelautan  | 6.585.024.888   |
| 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan  | --              |
| 16.6 | Subsektor Informasi dan Statistik   | 473.960.617     |
|      | Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  | 35.161.206.961  |
| 17   | SEKTOR HUKUM  |                 |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional  | 138.360.000     |

|      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum  | --                |
| 17.3 | Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum  | --                |
|      | Jumlah Sektor Hukum   | 138.360.000       |
| 18   | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN   |                   |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara   | 92.330.356.279    |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan                           | 3.169.292.914     |
|      | Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan  | 95.499.649.193    |
| 19.  | SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA        |                   |
| 19.1 | Subsektor Politik   | 8.194.676.255     |
| 19.2 | Subsektor Hubungan Luar Negeri  | --                |
| 19.3 | Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa                                    | 40.288.008.709    |
|      | Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa | 48.482.684.864    |
| 20   | SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  |                   |
| 20.1 | Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat                               | --                |
| 20.2 | Subsektor ABRI  | 835.055.005.415   |
| 20.3 | Subsektor Pendukung   | --                |
|      | Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan   | 835.055.005.415   |
|      | JUMLAH  | 9.008.800.449.481 |

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas